

Kebijakan politik perlindungan anak studi kasus proses pembuatan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang kota layak anak di Kota Depok = Child protection policy case study the formation process of the kota layak anak policy peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang kota layak anak in the City of Depok / Evana Febriani

Evana Febriani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20412840&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**  
Skripsi ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Perda Nomor 15 Tahun

2013 Tentang Kota Layak Anak di Kota Depok. Isu perlindungan anak menarik untuk dibahas sebab isu anak masih sering dianggap sebagai isu domestik. Kota Layak Anak merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasukan isu anak ke dalam agenda kebijakan politik lokal. Adanya Kota Layak Anak ini disebabkan Perlindungan kepada anak di tingkat lokal seringkali tidak mendapatkan prioritas pemerintah lokal. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik serta hambatan dalam proses pembuatan Perda. Analisis menggunakan representasi perempuan dalam kebijakan publik memperlihatkan bahwa isu anak di Kota Depok lebih banyak diakomodasi oleh kelompok perempuan anggota DPRD Kota Depok.

**ABSTRACT**  
This thesis discusses the formulation process of the Kota Layak Anak policy, or locally identified as Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak in the city of Depok. Kota Layak Anak is a program initiated by the Indonesian Ministry of Women Empowerment and Child Protection to introduce child issues into the local political agenda. The lack of attention by local government in regard of child issues is the main cause for this policy initiation. Using qualitative research methods, this thesis aims to uncover the political dynamics and obstacles in the policy formation process. By the analysis using datas on women representation on public policy formation process, it is revealed that child issues are being more accomodated by women members of the local parliament (DPRD Kota Depok).